

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan selalu menjadi masalah besar dan perhatian pemerintah bagi negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi minimal atau yang layak bagi kehidupannya (Ritonga, 2003). Menurut Kuncoro (1997) penduduk negara tersebut miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional, yang seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan di Indonesia seperti tingkat pendidikan yang masih rendah, terbatasnya modal usaha, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan kualitas kesehatan yang masih rendah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk ke dalam salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Bappeda Provinsi Yogyakarta (2021) mencatat jumlah penduduk DIY berada pada angka 3.322.727 jiwa sedangkan persentase penduduk miskin adalah 12,80% dalam periode 2021 dan jumlah penduduk miskin DIY sebesar 506,450 jiwa. Pada tahun 2018 tingkat kedalaman kemiskinan di DIY tercatat sebesar 2,19 poin. Penduduk miskin menurut kabupaten/kota di DIY menunjukkan pola yang tidak merata. Pemerintah Provinsi DIY menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 8,07% dengan melalui berbagai rencana program dan berbagai kegiatan. Kuncoro (2011)

menyatakan bahwa salah satu cara mengatasi kemiskinan desa dan kota adalah dengan melibatkan pemerintah daerah dan setiap masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2015-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bantul	160.15	142.76	139.67	134.84	131.15	138.66	146.98
Kulon Progo	88.13	84.34	84.17	77.72	74.62	78.06	81.14
Gunungkidul	155.00	139.15	135.74	125.76	123.08	127.61	135.33
Sleman	110.96	96.63	96.75	92.04	90.17	99.78	108.93
D.I.Yogyakarta	550.23	494.94	488.53	460.10	448.47	475.72	506.45

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta (2022).

Tabel 1.1 menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY dari tahun 2015 sampai tahun 2019, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 27,25 ribu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 475,72 ribu. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2021 sebesar 30,73 ribu dengan total jumlah penduduk miskin sebesar 506,45 ribu. Menurut Badan Pusat statistik (2021) penyebab utama peningkatan tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19 dan Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (2022) menyatakan bahwa adanya penurunan porsi pemberian bantuan pada tahun 2021 ke setiap kabupaten/kota DIY. Menurut Salim *et al.* (2018) melalui Laporan dari Jurnal Perencanaan DIY bahwa

salah satu kabupaten di DIY yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi adalah Kabupaten Bantul. Dihitung dari nilai kontribusi masing-masing dari 4 desa di DIY, Bantul menjadi kontributor utama dan disusul Gunungkidul dan Sleman. Bantul dan Gunungkidul menyumbang masing-masing 3,7% dan 3,6% kemiskinan di DIY dan jika digabung kedua kabupaten tersebut menyumbang 7,3% dari 13% tingkat kemiskinan di DIY. Kurangnya optimalisasi dalam penyaluran dana desa dan juga tingginya angka kemiskinan khususnya di pedesaan DIY disebabkan karena kepemilikan usaha tani yang sangat terbatas. Hal tersebut menjelaskan bahwa berbagai upaya pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanggulangan kemiskinan tersebut.

Upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) tentang desa, yaitu diberi sumber pendapatan dari desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, selain adanya Dana Desa Pemerintah juga memberikan penyaluran seperti DAK dan DAU sebagai upaya percepatan penganggulangan kemiskinan. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah (Anggoro, 2017), sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu.

Tabel 1. 2
Penyaluran Dana Desa DIY Tahun 2015-2021

Tahun	Bantul	Kulon Progo	Gunungkidul	Sleman
2015	26.962.671.000	26.948.074.000	46.117.057.000	28.048.816.000
2016	60.601.265.000	60.511.729.000	103.567.918.000	63.014.717.000
2017	77.730.491.000	77.627.477.000	132.353.781.000	80.855.813.000
2018	79.076.105.000	76.680.810.000	117.574.520.000	81.187.698.000
2019	98.359.905.000	90.337.907.000	136.052.137.000	99.035.176.000
2020	84.648.586.000	93.551.808.000	112.995.119.200	84.392.180.900
2021	109.399.072	95.885.997	144.614.409	110.556.360

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah DIY (2019)

Tabel 1.2 menunjukkan besarnya angka penyaluran dana desa di Provinsi DIY dimulai pada tahun 2015 sampai tahun 2019 penyaluran dana desa bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penyaluran dana desa di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman, sementara angka penyaluran dana desa di Kabupaten Kulon Progo bertambah. Pada tahun 2021 semua desa mengalami penurunan secara drastis. Gunungkidul menjadi kabupaten dengan tingkat penyaluran dana desa tertinggi akan tetapi tingkat kemiskinan di Gunungkidul masih tinggi di tahun 2021. Sejak digulirkannya dana desa pada tahun 2015 angka kemiskinan mengalami penurunan, akan tetapi penurunan angka kemiskinan tersebut belum menjadi indikator keberhasilan dana desa dalam mencapai tujuannya. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo (2021) menyatakan bahwa pada tahun 2021 penyaluran dana desa secara nasional baru mencapai 25% dan Provinsi DIY tercatat sebagai ranking ke 2 pada posisi 73,25% setelah posisi

bali 73,35%. Peningkatan anggaran dana desa dari tahun ke tahun dikecualikan pada tahun 2021 mampu membangun fasilitas fisik di 4 desa, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya dapat menekan angka kemiskinan di DIY. Hal ini berkaitan dengan Penelitian Yanuar *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa dana desa yang dimanfaatkan pada pembangunan fisik setiap desa akan mempengaruhi kemiskinan jika pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan atau berdampak langsung terhadap penduduk miskin.

Pemerintah DIY juga melakukan penyaluran bantuan dana desa pada tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan tujuan membantu masyarakat untuk menjaga daya beli bagi masyarakat miskin di pedesaan yang terdampak situasi Virus Corona. Pemberian bantuan dana desa tersebut dikhususkan kepada masyarakat miskin yang belum menerima PKH, pertolongan pangan non tunai, dan yang belum menerima kartu prakerja. Banyaknya bantuan dana desa yang diberikan pemerintah, dapat dikatakan bahwa penyaluran dana desa berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Seluruh desa di setiap kabupaten Provinsi DIY sudah banyak yang menerima bantuan dana desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY (2020) menyatakan bahwa jumlah desa di DIY yang sudah menyalurkan BLT kepada masyarakat sebanyak 385 dari 392 desa se-DIY dengan jumlah penerima 57.404

keluarga penerima manfaat (KPM) dan bantuan tersebut sangat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin di pedesaan.

Bantuan lainnya juga diberikan oleh pemerintah yaitu bantuan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di DIY. Bappeda Provinsi DIY (2020) pada Penetapan Kebijakan Umum Anggaran mencatat bahwa DAU di Provinsi DIY senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan nilai tahun anggaran 2019 sebesar Rp 89,553 milyar dan naik sebesar Rp 13,690 milyar atau dalam persentase 15,29 dari APBD murni pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 103,244 milyar. Persentase alokasi pagu terbesar terdapat pada Pemda Provinsi DIY sebesar 27%. Melalui Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK DIY (2020) Kabupaten Gunungkidul adalah penerima persentase realisasi penyaluran tertinggi DAK fisik, penyaluran DAK fisik terbanyak di Provinsi DIY berada di bidang kesehatan karena difokuskan untuk penanganan dan pencegahan COVID-19.

Banyaknya bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah mulai dari bantuan tunai, bantuan fasilitas fisik dan lainnya, ternyata masih memiliki beberapa hambatan dan permasalahan di masyarakat DIY. Menurut Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI (2020) bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu rendahnya sumber daya manusia dan peran pendamping yang belum maksimal dalam pengelolaan dana desa, dimana hal tersebut dapat menghambat pembangunan. Faktor tersebut mengakibatkan dana desa menjadi tidak sepenuhnya mampu dalam upaya pengentasan kemiskinan, sedangkan pada penyaluran bantuan sosial (termasuk BLT dana desa) masih terjadi ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, kualitas sembako rendah dan distribusi

tidak optimal serta masih adanya tumpang tindih dengan bantuan pemda. Implementasi penggunaan dana desa yang masih kurang optimal, pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang belum terealisasi dan minimnya partisipasi masyarakat merupakan penyebab rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi DIY masih tinggi.

Penelitian Zakiyah *et al.* (2020) menyatakan bahwa masalah lain dalam penyaluran dana desa yaitu data masyarakat yang tidak akurat dan tidak tepat sasaran dikarenakan tidak adanya pembaharuan data. Kunci permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pembaharuan data masyarakat setiap provinsi sehingga bantuan dana desa baik dalam program BST maupun BLT dana desa dapat mencakup seluruh kelompok masyarakat rentan yang benar-benar membutuhkan. Program dana desa jika dijalankan dengan baik maka akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kemiskinan baik dari segi bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan dan dalam bidang pemberdayaan lainnya (Rinaldi, 2022). Dana desa diharapkan mampu secara efektif dan berpengaruh untuk menekan angka kemiskinan di DIY dengan memastikan pemakaian anggaran dana desa mengacu pada target sasaran atas kegiatan-kegiatan yang dibangun oleh desa. Pengukuran efektifitas penggunaan dana desa tersebut diukur melalui kegiatan sarana prasarana dan non-sarana prasarana yang ada di 4 desa di DIY.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa dana desa, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berperan penting dalam pengentasan kemiskinan di DIY, akan tetapi harus dilakukan alokasi dana yang merata secara keseluruhan dan tepat sasaran serta pengelolaan sumber-sumber

pendapatan secara optimal, efisien dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja yang harus diprioritaskan. Hal ini juga harus didukung dengan kapasitas SDM, karena semakin besar dana desa yang disalurkan maka kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan desa harus memadai. Keseimbangan tersebut berpengaruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan di DIY akan berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh Penelitian Made Krisna dan Made Suyana (2019) yang menyatakan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi penyaluran dana desa, maka semakin rendah tingkat kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis akan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Desa (DD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2021.” Alasan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah dengan penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dapat berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di DIY pada Tahun 2015-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa (DD) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2021?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2021?

3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Desa (DD) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh dana desa, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan referensi pemerintah untuk meningkatkan kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah tidak lain dari jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, yang kebenarannya harus diuji lagi secara empiris. Hipotesis merupakan sesuatu yang dicari tahu dan dipelajari (Nazir, 2005). Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2021.
2. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2021.
3. Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan membagi pembahasan dalam 5 bab. Masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1 akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang akan mendasari penelitian ini dan studi empiris yang dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan penelitian ini akan dibahas pada bab 2 ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab 3 akan diuraikan tentang data dan sumber data yang digunakan peneliti dengan menggunakan alat bantu berupa program *Eviews (Econometric Views)*, bab ini juga menjelaskan batasan operasional dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan perhitungan dari estimasi model analisis regresi data panel dan pembahasan lebih lanjut terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian akan dibahas pada bab 4 ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab 5 diperoleh kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya. Bab ini juga akan berisi beberapa saran dari peneliti.